

Analisis Kebijakan Rencana Pembangunan Kereta Gantung Seruni Point-Gunung Bromo dalam Mendukung Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Muhammad Najih Fasya

Institut Teknologi Bandung

*anandanajih@gmail.com

Informasi Artikel

Received: 17 Desember 2022

Accepted: 15 Maret 2024

Published: 18 Maret 2024

Keywords:

content analysis, tourism
policy

Abstract

The cable car development plan is one of the main projects proposed by the Governor of East Java, Dra Hj. Khafifah Indar Parawansa, M.Sc to accelerate the construction of the TN BTS, including through the construction of a cable car facility which will be an attraction for tourists to enjoy the sunrise and sunset views in the TN BTS area. The development of a cable car has the potential to bring commercial benefits for both the community and the government. The purpose of this study is to analyze various tourism policies that support the plan to build the Seruni Point-Bromo cable car. Based on the policy analysis, conformity has been found between the cable car development plan and various planning and development policy documents. The plan to build a cable car in a strategic tourism area has the potential to drive investment so that it will trigger economic growth. The development of a cable car can create a new tourist attraction that has a different type in an effort to capture new market opportunities.

Abstrak

Rencana pengembangan kereta gantung menjadi salah satu proyek utama yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur, Dra Hj. Khafifah Indar Parawansa, M.Si untuk mempercepat pembangunan TN BTS, antara lain melalui pembangunan fasilitas kereta gantung yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk menikmati pemandangan *sunrise* dan *sunset* di Kawasan TN BTS. Pengembangan kereta gantung sangat berpotensi mendatangkan keuntungan secara komersial baik untuk masyarakat dan juga pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan pariwisata yang mendukung rencana pembangunan kereta gantung Seruni Point-Bromo. Berdasarkan analisis kebijakan, telah ditemukan kesesuaian antara rencana pembangunan kereta gantung dengan berbagai dokumen kebijakan perencanaan dan pembangunan. Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan strategis pariwisata berpotensi sebagai penggerak investasi sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kereta gantung dapat menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Kata Kunci:

analisis konten, kebijakan
kepariwisataan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dapat diwujudkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah serta didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Prinsip pembangunan ekonomi nasional tidak pernah lepas dari pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Percepatan pembangunan daerah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional didorong dari segi produksi yang dilakukan oleh lapangan usaha, serta konsumsi rumah tangga yang meningkat. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Jawa Timur yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor industri serta pengembangan sektor pariwisata unggulan. Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai macam potensi dari segi ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Demikian juga kiranya percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tentunya akan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada khususnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya-Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Rencana percepatan pembangunan ekonomi tersebut tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan, dan diharapkan dapat mewujudkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat di Jawa Timur dan Nasional. Pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 8, antara lain wilayah Probolinggo-Lumajang yang memiliki fungsi wilayah sebagai pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.

Terdapat dua pendekatan dalam percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, pendekatan pertama diterapkan untuk Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, dan pendekatan kedua diterapkan untuk Kawasan Prioritas Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN BTS). Kawasan Prioritas TN BTS ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). KSPN Bromo-Tengger-Semeru termasuk kedalam 10 besar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dari 88 KSPN di Indonesia. Penetapan Kawasan TN BTS sebagai KSPN berdampak pada prioritas program-program pembangunan.

Kawasan TN BTS merupakan destinasi wisata alam unggulan yang memiliki potensi wisata dan produk perkebunan. Selain itu Kawasan TN BTS memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak

di Kota Malang dan pada Sistem Perkotaan meliputi kawasan Kota Malang - Kota Sidoarjo - Kota Mojokerto (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019). Selain itu untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Probolinggo, serta Pusat Kegiatan Lokal berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan dan Kota Batu. Kawasan TN BTS memiliki program/proyek yang tersebar di beberapa kota dan daerah. Kabupaten Probolinggo yang termasuk ke dalam wilayah TN BTS memiliki beberapa program/proyek antara lain pengembangan kereta gantung dari Puncak Pananjakan 2 (Seruni Point) - Kawah Bromo (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019; (Pemerintah Republik Indonesia, 2019)).

Konsep pengembangan kereta gantung di Kawasan TN BTS sudah ada sejak tahun 2016 (Kompas, 2020), lima tahun setelah TN BTS ditetapkan sebagai KSPN. Rencana pengembangan kereta gantung menjadi salah satu proyek utama yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur, Dra Hj. Khafifah Indar Parawansa, M.Si untuk mempercepat pembangunan TN BTS, antara lain melalui pembangunan fasilitas kereta gantung yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk menikmati pemandangan *sunrise* dan *sunset* di Kawasan TN BTS (Kompas, 2020). Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elistianto Dardak, B.Bus., M.Sc menjelaskan bahwa rencana pengembangan kereta gantung merupakan opsi yang dipilih pemerintah untuk mempermudah akses menuju Gunung Bromo di dalam Kawasan TN BTS, dan gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan studi-studi ilmiah terlebih dahulu. Ir. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan mengemukakan bahwa pengembangan

kereta gantung sangat berpotensi mendatangkan keuntungan secara komersial baik untuk masyarakat dan juga pemerintah (Suarasurabaya, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan kepariwisataan yang mendukung rencana pembangunan kereta gantung Seruni Point-Bromo ditinjau dari muatan arahan pengembangan pembangunan kereta gantung pada dokumen-dokumen perencanaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tidak banyak publikasi artikel yang membahas terkait pengembangan kereta gantung di Indonesia, dan belum ada publikasi artikel terkait pengembangan kereta gantung di Kawasan TN BTS, khususnya dikaji melalui pendekatan analisis kebijakan. Pertama, menurut (Nur Muhammad Taufiq et al., 2019), dalam penelitiannya bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke kereta gantung pada rute perjalanan Kota Malang-Kota Batu dengan menggunakan Analisis Stasistik Deskriptif. Kedua, menurut (Purnomo et al., 2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi diversifikasi produk pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Ijen dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Salah satu bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dapat dibuat di KSPN Ijen adalah pembangunan kereta gantung yang direncanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Ketiga adalah penelitian dari (Suyasa & Dahana, 2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di Gunung Abang Kintamani dan mencari tahu upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah

Gunung Abang dengan pendekatan hukum normatif.

Penelitian keempat yaitu dari (Marian et al., 2022) dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan kereta gantung sebagai penunjang pariwisata di Kota Batu, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif analisis kelayakan proyek, sehingga tidak menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Lalu kelima, menurut (Alfian Hidayat & Hamid, 2023) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menggali isu penting tentang penggunaan media sosial, seperti Change.org, Facebook, dan YouTube, sebagai alat untuk menyuarakan pendapat tentang kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terutama, penelitian ini mencermati fenomena "clicktivism" atau pergerakan berbasis klik di media sosial yang memengaruhi pemahaman dalam politik kebijakan. Penelitian (Alfian Hidayat & Hamid, 2023) berfokus kepada cara clicktivism memfasilitasi penolakan masyarakat Nusa Tenggara terhadap kebijakan pembangunan kereta gantung Rinjani oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan netnografi, sebuah bentuk penelitian yang memungkinkan penyelidikan budaya konsumen *online*.

Persamaan penelitian ini dengan (Nur Muhammad Taufiq et al., 2019; Purnomo et al., 2019) terletak pada substansi muatan pembangunan kereta gantung, namun penelitian (Purnomo et al., 2019) tidak fokus kepada substansi pembangunan kereta gantung. Selanjutnya pada penelitian (Suyasa & Dahana, 2022) juga memiliki persamaan mengenai substansi muatan pembangunan kereta gantung dengan pendekatan kebijakan melalui analisis hukum normatif namun tidak secara eksplisit mengkaji kebijakan pembangunan kereta gantung dari

muatan arahan pengembangan yang ada di dokumen perencanaan. Adapun penelitian dari dari (Marian et al., 2022) memiliki persamaan dari substansi muatan pembangunan kereta gantung, namun lebih berorientasi kepada pendekatan ekonomi, bukan kebijakan. Selanjutnya penelitian dari (Alfian Hidayat & Hamid, 2023) memiliki persamaan dengan penelitian ini juga dari pendekatan kebijakan pembangunan kereta gantung, namun yang membedakan adalah pengkajian kebijakan melalui metode netnografi, bukan melalui kajian kebijakan dokumen perencanaan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Studi terdahulu dari kelima penelitian tersebut masih belum banyak penelitian dengan pembahasan yang menggunakan pendekatan analisis kebijakan secara komprehensif, hanya penelitian dari (Suyasa & Dahana, 2022). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Suyasa & Dahana, 2022) lebih fokus kepada kajian preventif dari perencanaan kereta gantung. Sedangkan penelitian ini merupakan mengkaji landasan kebijakan awal dari adanya perencanaan kebijakan kepariwisataan khususnya dalam pengembangan kereta gantung di Kawasan TN BTS serta mengkaji kebijakan secara spesifik dilihat dari muatan arahan pengembangan yang ada di dokumen perencanaan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengkaji perencanaan kereta gantung di TN BTS melalui pendekatan analisis kebijakan.

Adapun pendekatan analisis kebijakan yang digunakan pada penelitian ini meninjau kebijakan sektoral dan spasial. Kebijakan sektoral bersumber kepada kebijakan rencana pembangunan, rencana induk pembangunan kepariwisataan dan

rencana percepatan pembangunan ekonomi. Sedangkan kebijakan spasial yang dikaji adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah dan didukung dengan rencana teknis yaitu *Detail Engineering Design (DED)*. Pendekatan kebijakan sektoral dan spasial dilandasi pada sistem kepariwisataan karena sistem kepariwisataan adalah suatu konsep yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan multisektor (lingkungan usaha) dan multidimensi (spasial, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain) (Gunn & Var, 2002; Leiper, 1990; Morrison et al., 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan kepariwisataan merupakan regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi (Goeldner & Ritchie, 2012). Selain itu (Gunn & Var, 2002) juga menjelaskan bahwa dalam keterhubungan multisektor dan multidisiplin, semua lembaga pemerintah yang terkait dengan pariwisata mempunyai kewajiban untuk memastikan kebijakan dan praktik kepariwisataan memberikan peluang untuk menghubungkan preferensi pasar pariwisata (*demand*) dengan pengembangan *supply*.

Konsep *demand* dan *supply* kepariwisataan diwujudkan melalui sistem kepariwisataan yang menjadi hal yang fundamental dalam perencanaan kepariwisataan (Gunn & Var, 2002). Perencanaan kepariwisataan menggunakan konsep perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik sistem kepariwisataan untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan (Inskip, 1991).

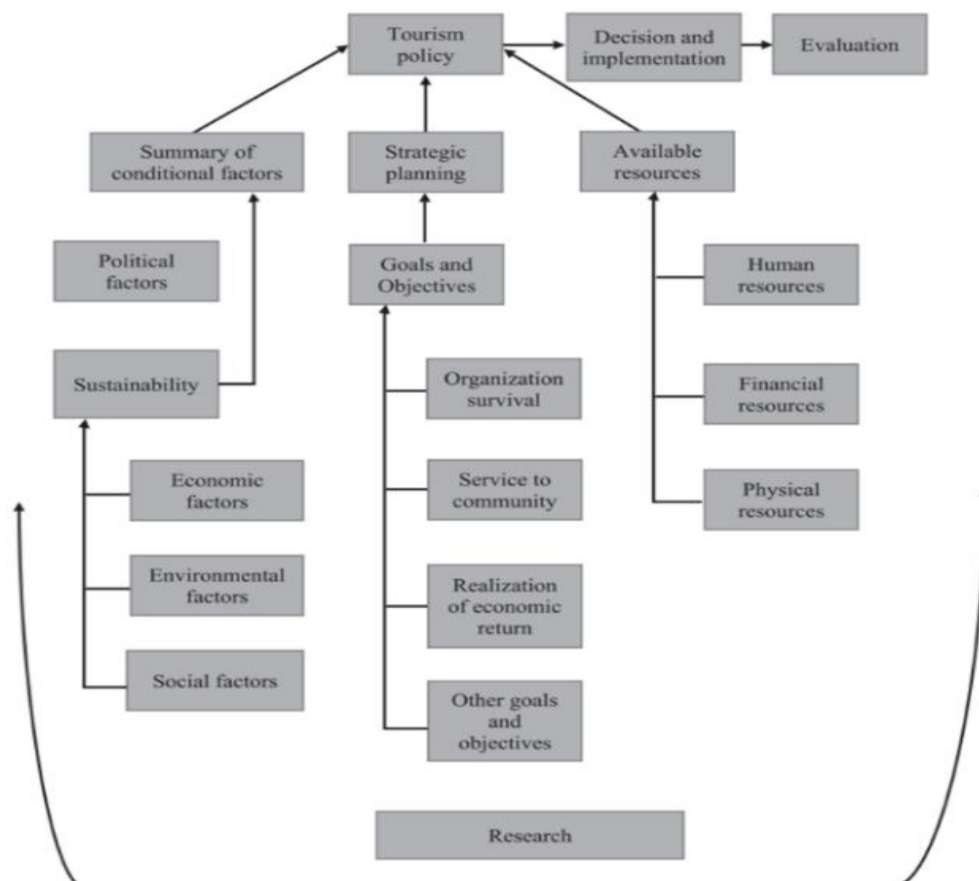
Pembangunan kepariwisataan dapat diwujudkan melalui pengembangan kebijakan kepariwisataan. Kebijakan kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan, aturan, panduan, petunjuk, serta tujuan dan strategi pengembangan/promosi yang menyediakan kerangka kerja di dalamnya keputusan kolektif dan individu yang secara langsung memengaruhi perkembangan pariwisata jangka panjang dan segala aktivitas di dalam sebuah destinasi pariwisata (Goeldner & Ritchie, 2012).

Kebijakan kepariwisataan bertujuan untuk memastikan bahwa wisatawan diterima dengan cara yang mengoptimalkan manfaat bagi pemangku kepentingan sambil mengurangi dampak negatif, biaya, dan efek yang terkait dengan keberhasilan tujuan pariwisata tersebut. Kebijakan kepariwisataan menjadi sangat penting karena beberapa hal, yaitu: (Goeldner and Ritchie 2012); (1) Menjadi peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemangku kepentingan pariwisata; (2) Menetapkan kegiatan yang dapat diterima oleh wisatawan; (3) Memberikan *guideliness* bagi seluruh stakeholder pariwisata; (4) Memfasilitasi konsensus seputar strategi dan tujuan spesifik untuk destinasi pariwisata tertentu; (5) Memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan swasta tentang peran dan kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat; (6) Memberikan peluang kepada sektor pariwisata untuk berinteraksi secara efektif dengan sektor-sektor lain (multisektor).

Pembuat kebijakan kepariwisataan dalam menentukan kebijakan dan rencana di masa depan akan bergantung pada penelitian yang solid untuk lebih memahami dan menerima konsep-konsep baru yang muncul (Edgell Sr & Swanson, 2019). Pentingnya penelitian sebagai landasan visioner kebijakan-

kebijakan tersebut diakui sebagai hal yang penting oleh tingkat lokal, provinsi/negara bagian, regional, dan nasional perencana kepariwisataan saat

mereka mempersiapkan pengembangan pariwisata di masa depan (Goeldner and Ritchie 2012).



Gambar 1. *Tourism development policy process*

Sumber: Goeldner and Ritchie 2012

Pariwisata tidak hanya digunakan untuk tujuan ekonomi namun juga dapat digunakan untuk tujuan politik yaitu sebagai kebijakan (Edgell Sr and Swanson 2019). Kebijakan di Indonesia diatur UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) Pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kepariwisata yang menjadi landasan

pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Analisis konten merupakan adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks (Eriyanto, 2013). Analisis konten dapat digunakan untuk mengkaji dan menginvestigasi suatu fenomena dari berbagai sumber data sekunder yang tersedia (Chen et al., 2022). Aspek kebijakan menjadi fokus dalam analisis konten penelitian ini. Analisis kebijakan adalah suatu metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/atau perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan

suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, analisis kebijakan difokuskan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun langkah-langkah review kebijakan adalah sebagai berikut: (1) Review literatur dan kebijakan mengenai penelitian dan tulisan multidisipliner lainnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, bertujuan tahapan ini untuk mendekonstruksi tulisan yang ada; (2) Pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola yang serupa dari informasi yang bersifat acak, bertujuan mengklasifikasikan secara umum konsep yang ada dan kemudian melihat kemiripan pola secara lebih detail; (3) Identifikasi konsep pengembangan kereta gantung; (4) Konseptualisasi, melakukan kajian/kaji ulang (review) terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah.

Dokumen-dokumen yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. TRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2011)
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2019)
3. RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 (Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, 2011)
4. Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingskar Wilis dan Lintas Selatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur 2017-2032 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017).
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo 2019-2034 (Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, 2019).
7. *Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Seruni Point*, Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 (Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Seruni Point Kabupaten Probolinggo, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2020). Terdapat berbagai sumber dan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Sumber pengumpulan data terbagi menjadi sumber data sekunder dan sumber data primer (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten/analisis isi.

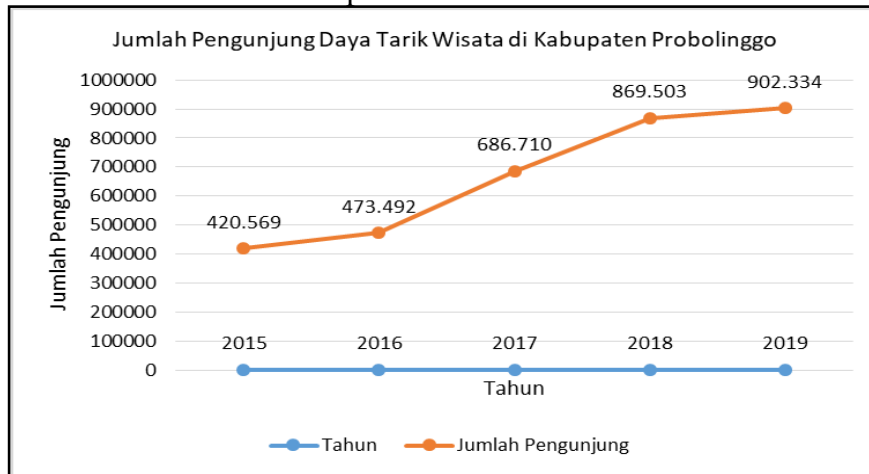
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pariwisata Seruni Point & Gunung Bromo

Seruni Point dan Gunung Bromo merupakan daya tarik wisata yang berada dalam satu kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo memiliki 37 daya tarik wisata yang terbagi menjadi 28 daya tarik wisata alam, 3 daya tarik wisata budaya dan 6 daya tarik wisata buatan

(Pariwisata Jawa Timur dalam Angka Tahun 2019; (Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, 2019)). Daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo adalah Gunung Bromo yang merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Mulai tahun 2015-2019 (Sebelum Pandemi Covid-19 pada

tahun 2020) jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Probolinggo selalu mengalami peningkatan. Gunung Bromo menjadi daya tarik wisata dengan jumlah pengunjung terbanyak dengan jumlah total pengunjung sebanyak 135.448 pada tahun 2019.



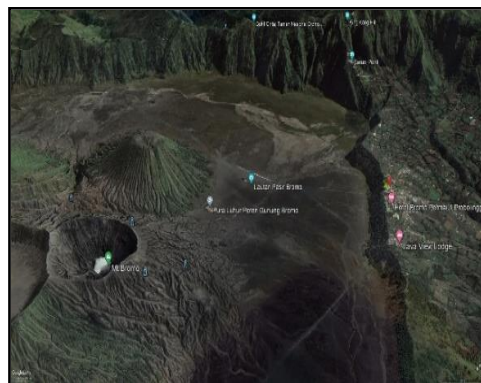
Gambar 2. Jumlah Pengunjung DTW di Kabupaten Probolinggo
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur (2019)



Gambar 3. Gunung Bromo
Sumber : Survei Primer (2020)



Gambar 4. Seruni Point
Sumber : Survei Primer (2020)



Gambar 5. Bentang Alam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Sumber : Google Earth (2022)

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Arahan pengembangannya adalah Pengembangan wilayah selatan Jawa Timur, salah satunya adalah Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya.. Klaster Probomajang (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang) Klaster ini

terbentuk karena berada pada kawasan Bromo Tengger Semeru. Arah pengembangan ekonomi pada klaster ini adalah meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor primer, memperluas pemasaran produk dengan integrasi pasar lokal dan regional, serta penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi.

Analisisnya adalah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa terdapat beberapa sektor yang berperan dalam pembangunan ekonomi, antara lain adalah sektor pariwisata. Pariwisata adalah sektor perekonomian yang bukan hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung di sektor tersebut seperti industri perhotelan dan atraksi wisata, namun juga menjadi penggerak sektor ekonomi terkait yang lain seperti jasa perdagangan, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Arah pengembangan adalah Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) menurut RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, termasuk ke dalam kawasan peruntukan pariwisata sebagai daya tarik wisata alam. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan strategis yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dapat ditinjau dari kepentingan ekonomi.

Analisisnya adalah sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, telah dijelaskan bahwa kawasan strategis provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Pengembangan kawasan strategis provinsi memiliki kebijakan

pengembangan antara lain sebagai pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah, khususnya dalam kegiatan ini adalah pengembangan kawasan TN BTS.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029

Arah pengembangannya adalah RTRW Kabupaten Probolinggo Tahun 2011-2031 menjelaskan di dalam rencana pola ruang kawasan budidaya, wisata alam Gunung Bromo ditetapkan sebagai peruntukan pariwisata alam. Selain itu di dalam rencana pola ruang kawasan lindung, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki arahan pengelolaan kawasan dalam peningkatan kegiatan pariwisata alam. Kawasan yang termasuk kawasan strategis di Kabupaten Probolinggo di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, kawasan wisata alam dan budaya yang tersebar di Kabupaten Probolinggo, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, kawasan lindung, kawasan perkotaan dengan perkembangan dinamis, lokasi industri strategis, kawasan sepanjang jalan arteri primer dan jalur regional, kawasan sepanjang pantai utara, serta kawasan perkebunan (hortikultura).

Analisisnya adalah sesuai dengan penetapan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka Taman Nasional Bromo Tengger Semeru termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat yang memiliki potensi besar dan merupakan prioritas I pengembangan khususnya di sektor pariwisata.

Pengembangan sektor tersebut akan dapat memberikan imbas positif pada sektor perhubungan, perdagangan, hotel dan restoran serta industri kecil/kerajinan.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Arahan pengembangannya adalah terdapat dua pendekatan dalam percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, pendekatan pertama diterapkan untuk Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dan pendekatan kedua diterapkan untuk Kawasan Prioritas Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN BTS). Kawasan TN BTS merupakan destinasi wisata alam unggulan yang memiliki potensi wisata dan produk perkebunan. Kawasan TN BTS memiliki program/proyek yang tersebar di beberapa kota dan daerah. Kabupaten Probolinggo yang termasuk ke dalam wilayah TN BTS memiliki beberapa program/proyek antara lain pengembangan kereta gantung dari Puncak Pananjakan 2 (*Seruni Point*) - Kawah Bromo serta penguatan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Program penguatan wisata tersebut sebagai proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) peningkatan fasilitas Bromo Tengger Semeru.

Analisisnya adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, secara jelas menyebutkan bahwa Kawasan TN BTS merupakan salah satu kawasan yang dilakukan rencana percepatan pembangunan ekonomi.

Peraturan ini merupakan landasan utama dalam penelitian ini. Di dalam lampiran Perpres No. 80 Tahun 2019 telah disebutkan sebanyak 47 program/proyek di Kawasan prioritas Bromo Tengger Semeru. Adapun salah satu program/proyek terlampir di Perpres tersebut, yang menjadi kajian dalam kegiatan ini adalah pengembangan kereta gantung Pananjakan 2 (*Seruni Point*) - Area Gunung Bromo.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032

Arahan pengembangannya adalah Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) menurut Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Analisisnya adalah KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

KSPP memiliki kriteria sebagai kawasan strategis pariwisata dengan posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034

Arahan pengembangannya adalah Kabupaten Probolinggo menjadi bagian dari Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS), khususnya

di Kecamatan Sukapura. Kecamatan Sukapura merupakan bagian dari klasifikasi wilayah Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) 1 Probolinggo. DPK Probolinggo adalah kawasan geografis di Kabupaten Probolinggo yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif Kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala Kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Selain itu di dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034, disebutkan terdapat 4 KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah) dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Probolinggo.

Destinasi Wisata Gunung Bromo termasuk ke dalam kategori pemantapan daya tarik wisata (DTW) karena diupayakan pengembangan yang dilakukan dapat menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Selanjutnya untuk destinasi wisata Seruni Point termasuk ke dalam kategori pembangunan DTW karena diupayakan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, segmen pasar dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada.

Analisisnya adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034 secara lebih spesifik menjelaskan arahan pengembangan untuk masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Probolinggo, khususnya yang masuk di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Arahan pengembangan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi

Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini.

Telah disebutkan arahan pengembangan untuk destinasi wisata Gunung Bromo dan Seruni Point, bahwasanya perlu diupayakan pengembangan yang dilakukan dapat menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru, serta diupayakan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, segmen pasar dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada.

Oleh karena itu pengembangan kereta gantung Pananjakan 2 (Seruni Point) - Area Gunung Bromo sudah sesuai dengan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Probolinggo untuk menghasilkan manfaat ekonomi untuk daerah, negara, masyarakat dan pemerintah.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: *Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo Tahun 2019*

Arahan pengembangannya adalah *Seruni Point* merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo yang menjadi pusat kegiatan wisata, hiburan, kesehatan, edukasi sekaligus ikon bagi Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari pembangunan *Seruni Point* adalah: (1) Meningkatkan kualitas lingkungan, infrastruktur permukiman dan daya tarik wisata kawasan *Seruni Point* sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan berdaya saing; (2) Meningkatkan citra dan diversifikasi produk wisata kawasan *Seruni Point* untuk menarik kunjungan

wisatawan yang lebih luas dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat; (3) *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Seruni Point, Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 menjelaskan detail teknis perencanaan Terminal Wisata Seruni Point di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari yang berjarak kurang lebih 750 m ke arah timur Seruni Pointt.

Analisisnya adalah Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan *Seruni Point*, Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 telah memberikan penjelasan lebih detail terkait pembangunan *Seruni Point*. Salah satu tujuan pembangunan *Seruni Point* adalah menciptakan produk wisata yang berbeda untuk menjangkau daya tarik wisata yang lebih luas.

Perencanaan Terminal Wisata *Seruni Point* yang tercantum dalam DED dapat mengintegrasikan pengembangan kereta gantung salah satunya untuk sarana stasiun kereta gantung. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Kebijakan Sumber Dokumen: Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Bromo Tengger Semeru

Arahan pengembangannya adalah Kawasan Cemoro Lawang menjadi daerah yang menjadi usulan program prioritas berupa Terminal Wisata dan *Community Center Seruni Point* dengan luas area yang direncanakan sebesar 1,75 Ha.

Analisisnya adalah *Masterplan* dan *Detail Engineering Design* (DED) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Bromo Tengger Semeru sudah mengakomodir *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan *Seruni Point*, Kabupaten

Probolinggo Tahun 2019. Khususnya dalam hal ini adalah perencanaan Terminal Wisata *Seruni Point*. Oleh karena itu pengembangan kereta gantung di *Seruni Point* - Area Gunung Bromo dapat terintegrasi dengan perencanaan Terminal Wisata *Seruni Point*, khususnya pengembangan sarana kereta gantung berupa halte kereta gantung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rencana pembangunan kereta gantung sudah sesuai dengan RPJMD Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RIPPARDA Provinsi Jawa Timur, RIPPARDA Kabupaten Probolinggo, DED Pembangunan Seruni Point dan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan strategis pariwisata berpotensi sebagai penggerak investasi sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kereta gantung dapat menciptakan daya tarik wisata baru (diversifikasi produk pariwisata) yang memiliki jenis daya tarik wisata berbeda dengan upaya menangkap peluang pasar baru, serta diupayakan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, segmen pasar dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada.

Rencana pembangunan kereta gantung perlu dimuat secara spesifik dan eksplisit di dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Probolinggo.

Saran

Saran untuk penelitian berikutnya adalah untuk lebih memperdalam kajian terhadap kebijakan pembangunan kereta gantung dengan mempertimbangkan aspek sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini dapat mencakup analisis mendalam terhadap dampak ekologis dari pembangunan infrastruktur kereta gantung, termasuk potensi kerusakan habitat alami, perubahan iklim mikro di sekitar kawasan, dan implikasi terhadap keanekaragaman hayati lokal.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya mitigasi dan restorasi lingkungan yang dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan kereta gantung untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan berimbang terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan kereta gantung yang berkelanjutan secara ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Probolinggo. (2019). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Probolinggo 2019-2034. In *Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2017). *Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Timur*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2019 - 2024*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. In *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2012 – 2025 . In *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi (Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. In *Pemerintah Republik Indonesia (80)*.
- Purnomo, A., Wiradimadja, A., & Kurniawan, B. (2019). Diversification of tourism product in KSPN Ijen. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 243(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012079>
- Suarasurabaya. (2020). *Menhub Budi Karya Sumadi Dukung Penuh Adanya Kereta Gantung di Batu dan Bromo*. Suarasurabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kel-anakota/2020/Menhub-Dukung-Perizinan-Kereta-Gantung-di-Batu-dan-Bromo/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyasa, Ip. O., & Dahana, C. D. (2022). Pengaturan dan Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Terkait Rencana Pembangunan Kereta Gantung Di Gunung Abang

Kintamani. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2057.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p08>

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 10, Jakarta (2004).